

**ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA RAWANG OGUANG
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Disusun dan diajukan untuk melengkapi dan memenuhi syarat
mencapai Gelar Sarjana Sosial Program Pendidikan Strata Satu
Program Studi Administrasi Negara*



Oleh :

**NAMA : NOVENDRA
NPM : 220411061**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN
2026**

PENGESAHAN SKRIPSI

Diperiksa dan Disahkan oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

Pada :
Hari : Kamis
Tanggal : 2 (Dua)
Bulan : Juli
Tahun : 2026

Tim Penguji

KETUA



EMILIA EMHARRIS, S.Sos., M.Si
NIDN. 1002059002

SEKRETARIS



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| 1. SARJAN M, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji I) | () |
| 2. Dr. DESRIADI, S.Sos., M.Si | (Anggota Penguji II) | () |
| 3. RISVANDI, S.Pd.I., M.Si | (Anggota Penguji III) | () |



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi

DEKAN N M, S.Sos., M.Si
NIDN. 1008128002

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI
DESA RAWANG OGUANG KECAMATAN
KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI
NAMA : NOVENDRA
NPM : 220411061
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS : ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS : ISLAM KUANTAN SINGINGI

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

PEMBIMBING I



SARJAN M, S.Sos., M.Si
NIDN. 11008128002

PEMBIMBING II



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

Mengetahui,
Ketua Program Studi Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Islam Kuantan Singingi



ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
NIDN. 1005108901

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

NAMA : NOVENDRA

NPM : 220411061

Menyatakan bahwa, sesungguhnya skripsi ini yang saya susun merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister dan Doktor), baik di Universitas Islam Kuantan Singingi maupun di Perguruan Tinggi lainnya. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak manapun, kecuali arahan tim pembimbing. Adapun bagian-bagian tertentu dalam skripsi yang saya peroleh dari hasil karya tulis orang lain atau sumber lain, telah saya tulis orang lain dengan mencantumkan sumber orang lain dengan jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan skripsi dan mengulang penelitian, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Teluk Kuantan, 6 Mei 2026



NOVENDRA
NPM. 220411061

MOTTO

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulit nya kita yang mereka ingintahu hanya bagian *succes stroies*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangan hari ini, tetap berjuang ya!”

“Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan.”

(Q.S Al-insyirah :5)

“Terlambat bukan bearti gagal, cepat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setia orang memiliki proses yang berbeda. PERCAYA PROSES itu yang paling penting, Karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Edwar Satria)

“Bila esok nanti kau sudah lebih baik, jangan lupakan masa-masa sulitmu. Ceritakan kembali pada dunia, caramu mrubah keluh jadi senyuman”

(Andmesh Kamelang)

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis diberi kesempatan untuk menyaksikan kebesaran serta keagungan-Nya. Berkat petunjuk dan ridho-Nya, penulis akhirnya mampu menyelesaikan penulisan dan penelitian skripsi ini dengan baik serta sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Rasulullah SAW, sosok pembawa risalah yang amanah dan penuh keteladanan, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafa'at beliau di kemudian hari, Aamiin.

Skripsi ini penulis persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Tot Mulyadi** dan **Ibunda Atis**, yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, serta memberikan kasih sayang dan pendidikan terbaik kepada penulis hingga mampu meraih pendidikan dan memahami arti kehidupan. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, serta dukungan yang tiada henti, yang menjadi sumber motivasi terbesar dalam perjalanan hidup penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada **Adinda Murni Chaniago** atas segala semangat dan dukungan yang diberikan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis



NOVENDRA

NPM. 220411061

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan, serta keimanan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Proposal ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam kesempatan ini, penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi, atas arahan dan dukungannya.
2. Bapak Sarjan M, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dan sekaligus selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan motivasinya.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan sekaligus selaku Pembimbing II, yang telah memberikan ilmu, semangat, dan arahan selama proses akademik.
4. Bapak Desriadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, masukan, serta motivasi selama proses perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, Terima kasih atas pengetahuan dan bimbingan yang telah diberikan sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah membantu saya dalam mengurus surat-surat kepentingan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan ini.

7. Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin dukungan, serta data yang di butuhkan untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan, semangat, dan kebersamaan selama menempuh pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh keterbukaan, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi penyempurnaan karya ini ke depannya. Semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Teluk Kuantan, 6 Mei 2026

Penulis



NOVENDRA
220411061

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN SKRIPSI	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO	iv
KATA PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.4.1 Manfaat Teoritis	14
1.4.2 Manfaat Praktis	14
BAB II KAJIAN TEORI	14
2.1 Konsep/Landasan Teori	14
2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara	14
2.1.2 Teori/Konsep Organisasi	19
2.1.3 Teori/Konsep Manajemen	22
2.1.4 Teori/Konsep Pemerintahan Desa	24
2.1.5 Teori/Konsep Keuangan Negara	28
2.1.6 Teori/Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	33
2.2 Kerangka Pemikiran	44
2.3 Hipotesis	44

2.4 Definisi Operasional.....	45
2.4.1 Perencanaan.....	45
2.4.2 Pelaksanaan.....	45
2.4.3 Penatausahaan	46
2.4.4 Pelaporan.....	46
2.4.5 Pertanggungjawaban	46
2.5 Operasional Variabel.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian.....	48
3.2 Informan.....	48
3.3 Sumber Data.....	49
3.3.1 Data Primer	49
3.3.2 Data Sekunder	50
3.4 Fokus Penelitian.....	50
3.5 Lokasi Penelitian.....	50
3.6 Metode Pengumpulan Data	50
3.6.1 Observasi.....	50
3.6.2 Wawancara.....	51
3.6.3 Dokumentasi	51
3.6.4 Triangulasi.....	51
3.7 Analisis Data	51
3.7.1 <i>Data Reduction</i> (Reduksi data)	52
3.7.2 <i>Data Display</i> (Penyajian Data)	52
3.7.3 <i>Conclusion Drawing</i> (Penarikan Kesimpulan)	52
3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian	53
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	54
4.1 Sejarah Desa Rawang Oguang	54
4.2 Keadaan Geografis	55
4.2.1 Batas Wilayah	55
4.2.2 Luas Wilayah	56
4.2.3 Orbitasi.....	56

4.3 Keadaan Jumlah Penduduk	56
4.4 Sarana Dan Prasarana Desa.....	59
4.5 Keadaan Ekonomi	60
4.5.1 Pertanian.....	60
4.5.2 Peternakan	61
4.5.3 Perikanan.....	62
4.5.4 Stuktur Mata Pencaharian	62
4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD).....	63
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL	65
5.1 Identitas Informan	65
5.1.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	65
5.1.2 Identitas Informan Berdasarkan Kelompok Umur.....	66
5.1.3 Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan	67
5.1.4 Identitas Informan Berdasarkan Jabatan	68
5.2 Hasil dan Pembahasan Penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.	69
5.2.1 Perencanaan.....	70
5.2.2 Pelaksanaan	78
5.2.3 Penatausahaan	86
5.2.4 Pelaporan.....	90
5.2.5 Pertanggungjawaban	98
5.3 Analisis Penelitian Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.	105
BAB VI PENUTUP.....	109
6.1 Kesimpulan	109
6.2 Saran.....	109
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN.....	115

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rawang Oguang Tahun Anggaran 2021...	7
Tabel I.2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rawang Oguang Tahun Anggaran 2022...	8
Tabel I.3 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rawang Oguang Tahun Anggaran 2023...	9
Tabel II.1 : Operasional Variabel Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi.....	47
Tabel III.1 : Informan Penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	49
Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	53
Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	57
Tabel VI.2 : Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Jenis Kelamin.....	58
Tabel VI.3 : Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tingkat Pendidikan.....	58

Tabel IV.4 : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	59
Tabel IV.5 : Jumlah Sektor Pertanian Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	60
Tabel IV.6 : Jumlah Sektor Perternakan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	61
Tabel IV.7 : Jumlah Sektor Perikanan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	62
Tabel IV.8 : Jumlah Mata Pencaharian Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.....	62
Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	66
Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Kelompok Umur Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	67
Tabel V.3 : Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	67
Tabel V.4 : Identitas Informan Berdasarkan Jabatan Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	69

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 : Kerangka Pemikiran Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dilaksanakan di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi	44
Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	63

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 : Daftar Wawancara Penelitian.....	115
Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian	124
Lampiran 3 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Tentang Penunjukan Pembimbing Skripsi Mahasiswa	128
Lampiran 4 : Surat Balasan Riset Penelitian	129
Lampiran 5 : Catatan Bimbingan Proposal.....	130
Lampiran 6 : Catatan Bimbingan Skripsi	132
Lampiran 7 : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Proposal Penelitian.....	134
Lampiran 8 : Lembar Persetujuan Pembimbing untuk Revisi Skripsi Penelitian	135
Lampiran 9 : Daftar Riwayat Hidup	136

ABSTRAK

ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA RAWANG OGUANG KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**NOVENDRA
NPM. 220411061**

Penelitian ini dilaksanakan di desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam analisis pengelolaan APBDes dilaksanakan di desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Perumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik penarikan sampel menggunakan metode *Purposive Sampling*. Teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang mana jumlah informan pada penelitian ini berjumlah 7 orang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui wawancara kemudian reduksi data, penyajian data dan selanjutnya penulis mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang umumnya sudah sesuai dengan aturan.

Kata Kunci : APBDes, Pengelolaan, Keuangan Desa

ABSTRACT

ANALYSIS OF VILLAGE REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET (APBDes) MANAGEMENT IN RAWANG OGUANG VILLAGE KUANTAN HILIR SEBERANG SUB-DISTRICT KUANTAN SINGINGI REGENCY

**NOVENDRA
NPM. 220411061**

This research was conducted in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. This study aims to examine in depth the analysis of APBDes management implemented in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency. The research problem formulation is: How is the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency? The sampling technique used was the purposive sampling method. The sample determination technique was based on certain considerations, with the number of informants in this study totaling 7 people. The data analysis used was descriptive qualitative analysis, through interviews followed by data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions. Based on the results of interviews with informants, this study shows that the analysis of Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) management in Rawang Oguang Village, Kuantan Hilir Seberang District, Kuantan Singingi Regency has been implemented quite well. This can be seen from the stages of planning, implementation, administration, reporting, and accountability, which generally have been carried out in accordance with applicable regulations.

Keywords : APBDes, Management, Village Finance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Selanjutnya disingkat APBDes) merupakan aspek sentral dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik. Di tengah meningkatnya alokasi dana desa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur APBDes pada Pasal 72 untuk pendapatan desa, dan Pasal 73 untuk anggaran APBDes disusun oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Selanjutnya disingkat BPD) lalu ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes berfungsi sebagai sarana untuk menyusun, mengelola, dan mengevaluasi berbagai program pembangunan yang bersifat partisipatif dan berkeadilan. Maka dari itu, kualitas pengelolaan APBDes tidak hanya mencerminkan kapasitas teknis pemerintahan desa, tetapi juga mencerminkan sejauh mana akuntabilitas dan transparansi dijalankan sebagai prinsip dasar *good governance*.

Di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, APBDes memainkan peran vital dalam mengarahkan roda pembangunan lokal. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan APBDes kerap kali tidak selaras dengan rencana awal yang telah disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (Selanjutnya disingkat RKPDDes). Ketimpangan ini mengindikasikan adanya celah dalam perencanaan dan implementasi yang perlu ditelaah lebih lanjut.

Pengelolaan APBDes mencakup beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Setiap tahapan tersebut memiliki peran yang saling berkaitan dan menentukan

keberhasilan pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Namun, pada kenyataannya di lapangan, tidak semua tahapan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Secara normatif, pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengatur pengelolaan APBDes, dengan tujuan menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Regulasi tersebut menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta disiplin anggaran. Akan tetapi, implementasi regulasi tersebut di tingkat desa seringkali menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara aturan dan praktik di lapangan.

Kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes masih menghadapi berbagai permasalahan, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Permasalahan teknis meliputi keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam menyusun anggaran, mengelola administrasi keuangan, serta membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini berdampak pada kualitas pengelolaan keuangan desa yang belum optimal.

Selain itu, permasalahan non-teknis juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan APBDes. Salah satunya adalah rendahnya tingkat transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mendapatkan akses informasi yang memadai terkait penggunaan anggaran desa, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa.

Permasalahan lain yang sering ditemukan di lapangan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan APBDes. Musyawarah desa yang seharusnya menjadi forum partisipatif seringkali hanya dihadiri oleh kelompok tertentu, sehingga aspirasi masyarakat secara keseluruhan tidak terserap dengan baik. Hal ini menyebabkan program yang direncanakan kurang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam tahap pelaksanaan, sering terjadi ketidaksesuaian antara rencana yang telah disusun dengan realisasi di lapangan. Misalnya, terdapat program pembangunan yang tidak berjalan sesuai jadwal atau bahkan tidak terlaksana sama sekali. Kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada efektivitas penggunaan anggaran.

Keterlambatan pencairan dana desa juga menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi dalam pengelolaan APBDes. Keterlambatan ini berdampak langsung pada pelaksanaan program di lapangan, terutama kegiatan pembangunan fisik yang sangat bergantung pada waktu pelaksanaan. Akibatnya, target pembangunan desa seringkali tidak tercapai sesuai dengan rencana.

Selain itu, dalam pengelolaan keuangan desa juga ditemukan adanya ketidaktepatan dalam penentuan prioritas program. Beberapa program yang dilaksanakan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan mendesak masyarakat. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya data yang akurat atau adanya kepentingan tertentu dalam proses pengambilan keputusan.

Dari sisi pengawasan, peran BPD belum berjalan secara maksimal. BPD sebagai lembaga pengawas memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa

pengelolaan APBDes dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, keterbatasan kapasitas dan pemahaman anggota BPD seringkali menjadi kendala dalam menjalankan fungsi tersebut.

Pengawasan dari masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial juga masih relatif lemah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa serta kurangnya akses terhadap informasi yang transparan. Akibatnya, potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan APBDes menjadi lebih besar.

Faktor kepemimpinan kepala desa juga memiliki pengaruh yang signifikan. Gaya kepemimpinan yang terbuka dan partisipatif cenderung mendorong keterlibatan masyarakat serta meningkatkan transparansi. Sebaliknya, kepemimpinan yang cenderung tertutup dapat menghambat proses pengelolaan yang akuntabel.

Budaya organisasi di lingkungan pemerintahan desa juga turut mempengaruhi kualitas pengelolaan APBDes. Budaya kerja yang kurang disiplin dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk membangun budaya organisasi yang profesional dan bertanggung jawab.

Selain faktor internal, pengelolaan APBDes juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan regulasi yang cukup sering dapat menimbulkan kebingungan di tingkat desa dalam menyesuaikan pengelolaan keuangan. Hal ini memerlukan kemampuan adaptasi yang baik dari aparatur desa.

Dalam perspektif teori, pengelolaan APBDes dapat dianalisis melalui pendekatan *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut di tingkat desa seringkali menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.

Selain itu, teori manajemen publik juga menjelaskan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi yang berkelanjutan dalam pengelolaan keuangan. Ketiga aspek tersebut harus berjalan secara sinergis agar pengelolaan APBDes dapat memberikan hasil yang optimal.

Penelitian sebelumnya cenderung lebih banyak membahas aspek normatif pengelolaan APBDes, seperti kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur. Sementara itu, kajian yang menyoroti kondisi riil di lapangan, termasuk dinamika sosial dan kendala implementasi, masih relatif terbatas.

Kesenjangan penelitian ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai pengelolaan APBDes di tingkat desa. Penelitian yang berfokus pada kondisi empiris di lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai permasalahan yang terjadi.

Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu lokasi yang relevan untuk dikaji dalam penelitian ini. Desa ini memiliki karakteristik yang mencerminkan dinamika pengelolaan APBDes di tingkat desa, baik dari segi potensi maupun permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan pengamatan awal, terdapat indikasi bahwa pengelolaan APBDes di desa tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pelaksanaan program dan transparansi anggaran. Hal ini menjadi dasar penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan APBDes di desa tersebut juga masih perlu ditingkatkan. Partisipasi yang rendah dapat berdampak pada kurang optimalnya pelaksanaan program pembangunan desa.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis pengelolaan APBDes secara riil di lapangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai permasalahan yang terjadi secara lebih mendalam

Berikut ini tabel yang menggambarkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Rawang oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini :

Tabel I.1 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rawang Oguang Tahun Anggaran 2021

Uraian	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2021
PENDAPATAN DESA				
PENDAPATAN ASLI DESA	200.000	0		0
PENDAPATAN TRANSFER	1.235.181.000	1.232.512.475		1.232.512.475
Dana Desa	761.441.000	761.441.000	100%	761.441.000
Alokasi Dana Desa	343.241.000	340.644.477	98%	2.596.523
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	30.499.000	30.426.988	99%	72.002
Bantuan Keuangan Dari Provinsi, dan Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	100%	100.000.000
Jumlah Pendapatan Transfer	1.278.137.000	1.277.906.990	100%	1.277.906.990
PENDAPATAN LAIN-LAIN	78.000	467.904		467.904
JUMLAH PENDAPATAN	1.235.459.000	1.232.980.379		1.232.980.379
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	409.128.020	406.259.495	98%	406.259.495
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	237.740.280	237.740.280	100%	237.740.280
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	47.000.000	47.000.000	100%	47.000.000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	183.510.900	183.510.900	100%	183.510.900
Bidang Penanggulangan Bencana,	360.000.000	360.000.000	100%	360.000.000
JUMLAH BELANJA	1.237.379.200	1.234.510.675	99%	1.234.510.675
SURPLUS/DEFISIT DESA	(1.920.200)	(1.530.296)		(1.530.296)

Sumber : Kantor Desa Rawang Oguang 2025

Tabel I.2 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rawang Oguang Tahun Anggaran 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2022
PENDAPATAN DESA				
PENDAPATAN ASLI DESA	250.000	500.000		500.000
PENDAPATAN TRANSFER	1.202.870.000	1.200.328.079		1.200.328.079
Dana Desa	678.328.000	678.328.000	100%	678.328.000
Alokasi Dana Desa	382.443.000	379.829.088	90%	379.829.088
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	17.045.000	17.116.991	99%	17.116.991
Bantuan Keuangan Dari Provinsi, dan Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	100%	125.000.000
Jumlah Pendapatan Transfer	1.202.870.000	1.200.328.079	100%	1.200.328.079
PENDAPATAN LAIN-LAIN	78.000	243.706		243.706
JUMLAH PENDAPATAN	1.203.198.000	1.201.071.785		1.201.071.785
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	434.172.000	431.274.538	98%	431.274.538
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	298.755.560	295.909.010	100%	295.909.010
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	73.708.440	73.708.432	100%	73.708.432
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	87.962.000	83.597.000	100%	83.597.000
Bidang Penanggulangan Bencana,	273.600.000	273.600.000	100%	273.600.000
JUMLAH BELANJA	1.168.198.000	1.158.061.980	99%	1.158.061.980
SURPLUS/DEFISIT DESA	(35.000.000)	(43.009.805)		(43.009.805)

Sumber : Kantor Desa Rawang Oguang 2025

Tabel I.3 : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Rawang Oguang Tahun Anggaran 2023

Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	(%)	Lebih/Kurang 2023
PENDAPATAN DESA				
PENDAPATAN ASLI DESA	500.000,-	0,-		500.000,-
PENDAPATAN TRANSFER	1.256.302.375,-	1.253.484.763,-		2.817.612,-
Dana Desa	661.418.000,-	661.418.000,-	100%	0,-
Alokasi Dana Desa	390.631.000,-	387.813.388,-	99%	2.817.612,-
Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	37.253.375,-	37.253.375,-	100%	0,-
Bantuan Keuangan Dari Provinsi, dan Kabupaten/Kota	167.000.000,-	167.000.000,-	100%	0,-
Jumlah Pendapatan Transfer	1.256.302.375,-	1.253.484.763,-	99%	2.817.612,-
PENDAPATAN LAIN-LAIN	100.000,-	144.398,-		44.398,-
JUMLAH PENDAPATAN	1.256.302.375,-	1.253.629.161,-		3.273.214,-
BELANJA				
Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	466.792.296,-	459.466.944,-	98%	7.325.352,-
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	385.200.000,-	381.711.900,-	100%	3.488.100,-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	160.697.678,-	146.197.678,-	100%	14.500.000,-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	171.750.000,-	168.750.000,-	100%	3.000.000,-
Bidang Penanggulangan Bencana,	79.200.000,-	79.200.000,-	100%	0,-
JUMLAH BELANJA	1.263.639.974,-	1.235.326.522,-	99%	28.313.452,-
SURPLUS/DEFISIT DESA	(6.737.599,-)	18.302.639,-		(25.040.238,-)

Sumber : Kantor Desa Rawang Oguang 2025

Desa Rawang Oguang di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu desa yang memperoleh sumber pendapatan terbesar dari dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan data Laporan Realisasi APBDes Tahun Anggaran 2021–

2023, terlihat bahwa struktur pendapatan desa masih didominasi oleh pendapatan transfer. Pada tahun 2021, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp1.232.512.475 atau hampir seluruh realisasi pendapatan desa sebesar Rp1.232.980.379. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2022 dengan realisasi pendapatan transfer sebesar Rp1.200.328.079 dari total realisasi pendapatan sebesar Rp1.201.071.785, dan pada tahun 2023 realisasi pendapatan transfer mencapai Rp1.253.484.763 dari total realisasi pendapatan sebesar Rp1.253.629.161. Sementara itu, Pendapatan Asli Desa (PADes) masih sangat rendah, bahkan pada tahun 2021 dan 2023 tidak terealisasi sama sekali, sedangkan pada tahun 2022 hanya terealisasi sebesar Rp500.000.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Desa Rawang Oguang masih rendah, karena sebagian besar pendapatan desa masih bergantung pada Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, serta Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten. Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Desa mengindikasikan bahwa potensi sumber pendapatan desa belum dikelola secara optimal, sehingga kemampuan desa dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas.

Dari sisi belanja desa, tingkat realisasi anggaran pada tahun 2021–2023 menunjukkan penyerapan yang cukup tinggi. Pada tahun 2021, realisasi belanja mencapai Rp1.234.510.675 atau sekitar 99% dari anggaran sebesar Rp1.237.379.200. Tahun 2022, realisasi belanja sebesar Rp1.158.061.980 atau sekitar 99% dari anggaran Rp1.168.198.000. Selanjutnya pada tahun 2023, realisasi belanja mencapai Rp1.235.326.522 atau sekitar 99% dari anggaran

sebesar Rp1.263.639.974. Sebagian besar bidang belanja, seperti Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak menunjukkan tingkat realisasi yang tinggi, bahkan beberapa bidang mencapai 100%.

Meskipun tingkat penyerapan anggaran tergolong tinggi, masih terdapat selisih antara anggaran dan realisasi yang mengakibatkan terjadinya surplus maupun defisit anggaran. Pada tahun 2021 APBDes mengalami defisit sebesar Rp1.530.296, kemudian pada tahun 2022 defisit meningkat menjadi Rp43.009.805. Berbeda dengan dua tahun sebelumnya, pada tahun 2023 APBDes mengalami surplus sebesar Rp18.302.639, yang menunjukkan bahwa realisasi pendapatan lebih besar dibandingkan realisasi belanja. Perubahan kondisi tersebut mengindikasikan adanya dinamika dalam pengelolaan keuangan desa yang perlu dikaji lebih lanjut, terutama terkait proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran.

Fenomena lainnya yang terlihat dari data tersebut adalah masih adanya beberapa komponen anggaran yang tidak terealisasi secara penuh, seperti Alokasi Dana Desa yang hanya terealisasi sekitar 98–99% setiap tahunnya serta Pendapatan Asli Desa yang belum mampu mencapai target secara konsisten. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam optimalisasi penerimaan desa maupun pelaksanaan anggaran sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pengelolaan APBDes.

Dalam konteks kebijakan nasional, pengelolaan APBDes diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran. Oleh karena itu, tingginya tingkat realisasi anggaran tidak serta-merta menunjukkan bahwa pengelolaan APBDes telah berjalan optimal, tetapi juga perlu dilihat dari kesesuaian pelaksanaan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap tahapan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian untuk menganalisis bagaimana pengelolaan APBDes di Desa Rawang Oguang dilaksanakan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan tata kelola APBDes agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kemandirian keuangan desa.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai : **“Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi?”**.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam analisis pengelolaan APBDes dilaksanakan di desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pengelolaan APBDes di desa Rawang Oguang, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi. Adapaun manfaat Penelitian ini di bagi menjadi dua kategori :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Di harapkan penelitian ini dapat menjadi pijakan bagi pengembangan teori pembangunan desa, serta teori-teori baru dalam bidang pengelolaan APBDes.
- 1.4.1.2 Memberikan kontribusi dalam memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terkait manajemen keuangan desa, terutama dalam aspek pengelolaan APBDes.
- 1.4.1.3 Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa dalam konteks tata kelola pemerintahan desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi Pemerintah Desa Rawang Oguang Penelitian ini memberikan gambaran objektif dan komprehensif mengenai praktik pengelolaan APBDes.
- 1.4.2.2 Bagi Masyarakat Desa Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman warga mengenai peran aktif masyarakat dalam siklus APBDes
- 1.4.2.3 Bagi Lembaga Pendidikan Kajian ini dapat dijadikan sumber ajar empiris dalam pengembangan kurikulum dan pengajaran pada program studi Ilmu Administrasi Negara.
- 1.4.2.4 Bagi Pemerintah Daerah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan oleh pemerintah kabupaten dalam menyusun program pembinaan dan pengawasan terhadap desa.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Konsep/Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Administrasi Negara

Administrasi negara merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik untuk mencapai tujuan negara. Menurut Woodrow Wilson administrasi negara adalah proses pelaksanaan kebijakan pemerintah secara efisien dan rasional. Konsep ini menegaskan pemisahan antara ranah politik dan administrasi, di mana politik bertugas menetapkan kebijakan, sedangkan administrasi bertugas menjalankan kebijakan tersebut. Pandangan Wilson menjadi dasar pembentukan ilmu administrasi negara modern (Tangkilisan, 2020).

Menurut Leonard D. White menyatakan bahwa administrasi negara adalah seluruh proses yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan kepentingan publik. Administrasi negara tidak hanya mencakup birokrasi, tetapi juga mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi kebijakan publik. Dengan demikian, administrasi negara merupakan aktivitas yang bersifat kompleks dan dinamis (Sedarmayanti, 2021).

Prajudi Atmosudirdjo menjelaskan bahwa administrasi negara mencakup keseluruhan kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Administrasi negara tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga melibatkan nilai, etika, dan aspek sosial. Di Indonesia, administrasi negara sering dikaitkan dengan

kinerja birokrasi, pelayanan publik, dan implementasi kebijakan daerah (Kencana, 2022).

Max Weber memperkenalkan teori birokrasi yang menjadi dasar administrasi publik modern. Menurut Weber, birokrasi yang ideal harus memiliki struktur hierarkis, pembagian kerja yang jelas, aturan tertulis, dan profesionalisme aparatur (Siagian, 2021). Model birokrasi Weber dianggap mampu menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, birokrasi Weber juga dikritik karena dianggap terlalu kaku, lamban, dan kurang responsif terhadap perubahan masyarakat. Kritik terhadap model ini kemudian memunculkan pemikiran bahwa administrasi negara harus adaptif dan partisipatif. Menurut (Sedarmayanti, 2021), birokrasi di Indonesia masih banyak dipengaruhi oleh budaya patrimonial sehingga sulit menerapkan model Weber secara murni.

Woodrow Wilson mengemukakan pentingnya pemisahan antara politik dan administrasi. Menurutnya, politik menentukan kebijakan, sedangkan administrasi mengimplementasikan kebijakan tersebut secara netral dan profesional. Meskipun teori ini dikritik karena terlalu menyederhanakan hubungan antara politik dan administrasi, pemikiran ini tetap menjadi fondasi penting dalam kajian administrasi negara (Tangkilisan, 2020).

New Public Management (selanjutnya disingkat NPM) muncul pada era 1980-an sebagai kritik terhadap birokrasi tradisional yang dianggap terlalu lambat dan tidak efisien. Osborne dan Gaebler menyatakan bahwa sektor publik perlu menerapkan prinsip manajemen sektor swasta seperti efisiensi, orientasi hasil, dan

kompetisi. NPM menekankan pentingnya kinerja, privatisasi, dan desentralisasi dalam administrasi negara (Sedarmayanti, 2021).

Meskipun NPM mampu meningkatkan efisiensi, pendekatan ini dikritik karena terlalu berorientasi pada pasar dan mengabaikan aspek demokrasi. Denhardt menegaskan bahwa pelayanan publik tidak boleh dipandang sebagai komoditas, melainkan sebagai hak warga negara. Kritik ini menjadi dasar munculnya paradigma baru dalam administrasi negara (Pasolong, 2020).

New Public Service (selanjutnya disingkat NPS) merupakan paradigma baru administrasi negara yang menekankan pelayanan kepada warga negara, bukan kepada pelanggan. Menurut Denhardt administrasi negara harus berfokus pada partisipasi publik, nilai demokrasi, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam paradigma ini, aparatur negara berperan sebagai fasilitator, bukan sebagai penguasa (Pasolong, 2020).

Konsep NPS menekankan bahwa tujuan utama administrasi negara adalah melayani kepentingan publik secara adil, bukan mengejar efisiensi ekonomi semata. Dalam konteks Indonesia, penerapan NPS terlihat pada program pelayanan publik berbasis partisipasi masyarakat seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (selanjutnya disingkat Musrenbang). Hal ini menunjukkan pergeseran paradigma dari model birokrasi tradisional menuju *governance* partisipatif.

Governance merupakan konsep yang lebih luas daripada pemerintahan (*government*). Menurut UNDP, *governance* adalah proses pengambilan keputusan dan implementasinya yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat

sipil. *Governance* menekankan kerja sama antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan (Tangkilisan, 2020).

Good governance adalah bentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Menurut (Sedarmayanti, 2021), penerapan *good governance* di Indonesia merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Reformasi birokrasi di Indonesia adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembenahan struktur pemerintahan. KemenPAN-RB menyatakan bahwa reformasi birokrasi mencakup penyederhanaan proses administrasi, peningkatan kompetensi aparatur, dan pemanfaatan teknologi informasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (selanjutnya disingkat SPBE) (Pasolong, 2020).

Dalam konteks pemerintahan daerah, administrasi negara berkaitan erat dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyusun anggaran, mengelola sumber daya, dan memberikan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat di wilayahnya (Tangkilisan, 2020).

Administrasi negara juga berkaitan dengan penyusunan dan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (Selanjutnya disingkat APBD) serta APBDes. Pengelolaan anggaran merupakan wujud nyata implementasi administrasi negara dalam mengalokasikan sumber daya untuk kepentingan publik (Sedarmayanti, 2021).

Kebijakan publik merupakan bagian integral dari administrasi negara. Menurut Dunn, kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik. Administrasi negara berperan dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan tersebut. (Kencana, 2022). Dalam perspektif *governance*, proses pembuatan kebijakan tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat dan sektor swasta. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik mencerminkan pelaksanaan demokrasi dan prinsip *good governance*. (Tangkilisan, 2020).

Administrasi negara modern tidak bisa dipisahkan dari penggunaan teknologi informasi. SPBE merupakan wujud digitalisasi administrasi negara untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Menurut KemenPAN-RB digitalisasi layanan publik seperti e-budgeting dan e-government merupakan langkah strategis menuju birokrasi modern (Sedarmayanti, 2021).

Dengan demikian, administrasi negara telah berkembang dari birokrasi tradisional menuju model *governance* yang partisipatif dan berbasis teknologi. Perkembangan ini menunjukkan bahwa administrasi negara bukan hanya kegiatan teknis, tetapi juga sarat nilai, demokrasi, dan inovasi (Pasolong, 2020).

Secara keseluruhan, teori-teori administrasi negara seperti birokrasi Weber, NPM, NPS, dan *governance* memberikan kerangka berpikir untuk memahami dinamika penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, teori-teori tersebut dapat diaplikasikan dalam reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan pengelolaan anggaran daerah maupun desa.

2.1.2 Teori/Konsep Organisasi

Teori organisasi merupakan cabang ilmu yang membahas cara suatu organisasi dibentuk, dijalankan, dan dikelola agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks administrasi publik di Indonesia, mendefinisikan organisasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur manusia, teknologi, struktur, dan lingkungan yang saling berinteraksi untuk menghasilkan kinerja kolektif. Organisasi tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan publik secara efektif (Hasibuan, 2020).

Menurut E. Wight Bakke Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiversifikasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumberdaya alam menjadi satu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lainnya dari aktivitas manusia dan sumberdaya dalam lingkungannya (Kusdi, 2009).

Organisasi merupakan wadah formal tempat orang-orang bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ia menekankan pentingnya struktur dan pembagian kerja yang jelas agar koordinasi berjalan efektif. Organisasi juga dianggap sebagai sistem terbuka yang tidak bisa terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, ekonomi, dan politik di sekitarnya. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang adaptif terhadap perubahan eksternal akan lebih mampu bertahan dalam jangka panjang (Siagian, 2021).

Organisasi bukan hanya sebagai struktur formal, melainkan sistem sosial yang hidup dan dinamis. Dalam perspektif perilaku organisasi, interaksi antarindividu memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan organisasi (Thoha, 2020). Thoha menjelaskan bahwa perilaku individu di dalam organisasi sangat dipengaruhi oleh nilai, budaya, serta sistem komunikasi yang terbangun di lingkungan kerja. Oleh karena itu, manajemen organisasi harus memperhatikan aspek perilaku manusia agar tercipta iklim kerja yang produktif.

Teori organisasi dari perspektif birokrasi publik, organisasi publik berfungsi sebagai instrumen utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat (Dwiyanto, 2021). Dalam konteks ini, teori organisasi sangat penting untuk memastikan struktur birokrasi bekerja secara efektif, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*. Dengan memahami teori organisasi, birokrasi diharapkan dapat bertransformasi menjadi institusi yang adaptif dan berorientasi pada hasil.

Organisasi merupakan sistem kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu melalui pembagian tugas dan koordinasi kegiatan (Handoko, 2022). Pembagian kerja yang jelas dan mekanisme koordinasi yang baik, organisasi tidak akan mampu berfungsi secara efektif. Pandangan ini memperkuat gagasan bahwa koordinasi dan komunikasi merupakan elemen utama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi dan fleksibilitas organisasi.

Organisasi yang efektif harus dipahami sebagai sistem terbuka yang berinteraksi secara aktif dengan lingkungannya. Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan eksternal,

baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun teknologi. Dalam era disrupsi digital, kemampuan organisasi untuk berinovasi menjadi kunci dalam mempertahankan relevansi dan daya saing (Sedarmayanti, 2023b).

Konsep *collaborative governance* dalam teori organisasi publik, organisasi modern tidak lagi dapat berjalan secara hierarkis dan kaku, melainkan harus mengedepankan kolaborasi antaraktor, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat sipil. Model organisasi semacam ini menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, dan kepercayaan dalam proses pengambilan keputusan (Wibowo, 2023).

Selanjutnya, Setiawan menggabungkan berbagai pendekatan teori organisasi klasik dan modern dalam satu kerangka berpikir yang disebut teori organisasi kontemporer. Menurutnya, organisasi modern harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi struktural dan legitimasi sosial agar dapat bertahan dalam lingkungan yang kompleks. Organisasi tidak hanya dituntut efisien dalam operasional, tetapi juga harus memiliki kepekaan sosial terhadap tuntutan dan ekspektasi publik (Setiawan, 2025).

Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa teori organisasi mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan konteks sosial. Pendekatan klasik yang menekankan efisiensi struktural kini telah bergeser menuju pendekatan sistem terbuka dan kolaboratif yang menekankan interaksi manusia dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Teori organisasi menjadi landasan penting dalam memahami dinamika lembaga publik maupun privat,

terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi digital yang menuntut efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi yang berkelanjutan.

2.1.3 Teori/Konsep Manajemen

Secara etimologis *management* (di Indonesia diterjemahkan sebagai “manajemen”) berasal dari kata “*manus*” (tangan) dan “*agere*” (melakukan), yang di gabung menjadi kata “*manage*” (Bahasa Inggris) bearti mengurus atau “*managiere*” (Bahasa latin) berarti melatih (Andri & Siregar, 2021).

Manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan (Terry & George, 2005).

Manajemen adalah serangkaian aktivitas (termasuk perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber daya organisasi (manusia, financial, fisik, dan informasi) dengan maksud mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif (Griffin, 2004).

Menurut Bittle & Bittle bahwa dalam tataran praktis pengertian manajmen dibagi ke dalam beberapa definisi, antara lain bahwa manajemen menentukan kerja tim, delegasi (utusan). Dan hasil disisi lain, manajemen di definisikan sebagai suatu badan pengetahuan yang dapat diajarkan, diperlukan untuk

Lembaga dan institusi-institusi. Manajemen Adalah apa yang manajer kerjakan dalam pelaksanaan peran mereka sebagai manajer (Nugroho, 2017).

Menurut Robert Kritiner menyatakan bahwa manajemen merupakan cara aktivitas melewati orang lain agar tercapai tujuan (Madrasah et al., 2021). Sedangkan menurut Haroold Koontz dan Heinz Weihrich menyatakan bahwa manajemen merupakan proses rancang serta menentukan lingkungan di mana seseorang dapat bekerja sama dalam satu kelompok yang menginginkan efisiensi sebagai tujuan yang harus dilakukan (Madrasah et al., 2021).

Dari berbagai definisi manajemen yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa teori manajemen memiliki beragam bentuk dan pendekatan, begitu pula dengan fungsi-fungsinya yang bervariasi, mulai dari yang sederhana hingga yang kompleks. Berikut ini merupakan beberapa model manajemen yang diterapkan dalam organisasi, disertai dengan penjelasan mengenai fungsi-fungsi yang dijalankannya :

1. Model P-I-E (*Planning, Implementation, and Evaluation*). Model ini termasuk yang paling sederhana, karena hanya meliputi 3 fungsi saja yaitu fungsi perencanaan, implementasi, dan evaluasi sumber daya agar mencapai tujuan yang ditetapkan.
2. Model P-O-A-C (*Planning, Organizing, Actuating, and Controlling*). Namun, pengertian tersebut mengalami transformasi sekitar tahun 1914, dimana seorang ahli bernama Henry Fayol yang berkebangsaan Perancis mengatakan bahwa manajemen melaksanakan lima fungsi utama, yaitu merencanakan (*plan*) aktivitas yang akan dilakukan,

kemudian mengorganisasikan (*organize*) untuk mencapai rencana tersebut. Selanjutnya mengarahkan (*direct*) sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan rencana dan memimpin sumber dayanya (*leading*).

3. Model P1-P2-P3, dimana P1 adalah Perencanaan, P2 adalah Penggerakan dan Pelaksanaan, dan P3 terdiri dari Pengawasan, Pengendalian, dan Penilaian.
4. Model A-R-R-I-F (Analisis, Rumusan, Rencanam Implementasi, dan Forum komunikas). Model ini digunakan oleh organisasi yang bergerak di bidang partisipasi masyarakat.
5. Model A-R-R-I-M-E (Analisis, Rumusan, Rencana, Implementasi, Monitoring, dan Evaluasi). Model ini tidak jauh berbeda dengan model A-R-R-I-F, perbedaannya terletak pada fungsi Monitoring dan Evaluasi yang diletakkan terpisah.

2.1.4 Teori/Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan terendah yang berperan penting dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional. Desa tidak hanya dipandang sebagai satuan administratif, tetapi juga sebagai komunitas sosial yang memiliki sistem nilai, norma, dan tradisi yang hidup dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Hal ini menempatkan desa

sebagai entitas yang memiliki otonomi asli dan menjadi ujung tombak pelayanan publik serta pembangunan nasional.

Pemerintahan desa merupakan bentuk pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat, karena menjadi representasi dari kedaulatan masyarakat lokal. pemerintahan desa berakar pada tradisi, nilai, dan sistem sosial yang telah berkembang lama sebelum negara modern terbentuk. Oleh karena itu, desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dirinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal tanpa mengabaikan kebijakan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, pemerintahan desa mencerminkan sistem demokrasi lokal yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan (Ndraha, 2021).

Pemerintahan desa berperan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan nasional. Desa menjadi wadah penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta pembinaan kemasyarakatan yang secara langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Pemerintahan desa berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah di atasnya. Dalam pandangannya, hubungan sinergis antara pemerintah desa dan pemerintah daerah akan menciptakan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat (Rasyid, 2020).

Teori pemerintahan desa modern menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan prinsip tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*). Pemerintahan desa yang baik harus mampu melibatkan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga

evaluasi kebijakan publik (Eko, 2021). Eko menegaskan bahwa desa yang kuat adalah desa yang mampu mengelola urusannya secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan peran aktif warga. Dengan demikian, partisipasi menjadi fondasi utama bagi pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan.

Pandangan ini sejalan dengan Syafri yang menegaskan bahwa pemerintahan desa merupakan cerminan penerapan prinsip *good governance* di tingkat lokal. Menurutnya, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Pemerintahan desa tidak boleh dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan kepala desa, tetapi harus melibatkan berbagai elemen masyarakat agar setiap kebijakan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, pemerintahan desa dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memperkuat efektivitas pembangunan (Syafri, 2020).

Lebih lanjut, Haris mengemukakan bahwa pemerintahan desa memiliki dua dimensi utama, yaitu dimensi struktural dan dimensi fungsional. Dimensi struktural menggambarkan hubungan hierarkis antara desa dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sedangkan dimensi fungsional berkaitan dengan peran dan tanggung jawab aparatur desa dalam menjalankan pelayanan publik. Haris menegaskan bahwa keseimbangan antara kedua dimensi tersebut sangat penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan desa yang demokratis, responsif, dan efektif dalam melayani masyarakat (Haris, 2022).

Kepala desa memiliki peran sentral dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif. Kepemimpinan kepala desa tidak hanya

bersifat administratif, tetapi juga sosial dan transformasional. Kepala desa yang ideal adalah pemimpin yang mampu menggerakkan partisipasi masyarakat, menjembatani konflik sosial, serta mengarahkan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Dalam konteks modern, kepemimpinan kepala desa yang adaptif dan kolaboratif akan menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan di tingkat desa (Dwipayana & Eko, 2021).

Efektivitas pemerintahan desa sangat dipengaruhi oleh interaksi antara struktur birokrasi, kebijakan publik, dan budaya lokal. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong, musyawarah, dan solidaritas menjadi modal sosial penting yang harus dipertahankan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintahan desa yang baik bukan hanya ditentukan oleh kemampuan teknokratis aparatur, tetapi juga oleh keberhasilan dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. Dengan demikian, dimensi sosial dan budaya tidak dapat dipisahkan dari dimensi administratif pemerintahan desa (Riyadi, 2023).

Pemerintahan desa yang efektif adalah pemerintahan yang mampu mengelola sumber daya lokal secara profesional dan berorientasi pada hasil. Pentingnya manajemen berbasis data dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan pengelolaan sumber daya yang transparan dan akuntabel, desa dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Peningkatan kapasitas aparatur desa merupakan faktor kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang modern (Sedarmayanti, 2023a).

Dari perspektif sosiologis, Rahardjo menjelaskan bahwa desa merupakan entitas sosial yang memiliki identitas kultural dan nilai-nilai tradisional yang khas.

Pemerintahan desa, menurutnya, bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga simbol kemandirian dan kebersamaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, dalam merancang kebijakan pemerintahan desa, perlu memperhatikan kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan dapat diterima secara sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan desa tidak dapat diukur hanya melalui indikator ekonomi, tetapi juga melalui keberlanjutan nilai-nilai sosial dan budaya (Rahardjo, 2022).

Secara konseptual, seluruh pandangan para ahli di atas menunjukkan bahwa teori pemerintahan desa tidak hanya berfokus pada aspek struktur pemerintahan, tetapi juga pada dimensi sosial, partisipatif, dan kultural. Pemerintahan desa yang ideal adalah pemerintahan yang mampu memadukan kearifan lokal dengan prinsip tata kelola modern, sehingga tercipta keseimbangan antara otonomi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Desa bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, melainkan laboratorium sosial tempat demokrasi, pemberdayaan, dan pembangunan berbasis komunitas dapat berkembang secara nyata.

2.1.5 Teori/Konsep Keuangan Negara

Istilah keuangan Negara dalam kedudukan hukum tertinggi tercantum dalam pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi hal keuangan Negara selanjutnya diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan definisi keuangan Negara menurut Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yaitu Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Sedangkan Syamsi Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pun segala sesuatu (baik uang maupun barang) yang menjadikan kekayaan Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Basri & Subri, 2003).

Menurut M. Ichwan, Keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang (Tjandra, 2006).

Menurut Kwik Kian Gie, salah satu aspek atau tonggak keberhasilan atau kegagalan dalam berbangsa dan bernegara adalah keuangan negara. Karena keuangan negara memengaruhi pembangunan infrastruktur, pendidikan, pelayanan kesehatan, penyediaan *public utility*. Jika keuangan negara sangat terbatas, korupsi dan utang yang sangat besar maka pembangunan dan pelayanan publik akan terbatas. (Andri & Siregar, 2021)

Menurut Geodhart, keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut (Sulaiman, 2011).

Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi:

1. Periodik;

2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;
3. Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
4. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Arifin P. Soeria Atmadja mendefinisikan keuangan negara dari segi pertanggungjawaban oleh pemerintah, bahwa keuangan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah adalah keuangan negara yang hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN). Sehingga yang dimaksud dengan keuangan negara adalah keuangan yang berasal dari APBN. Arifin P. Soeria Atmadja menggambarkan dualisme pengertian keuangan negara, yakni pengertian keuangan negara dalam arti yang luas dan pengertian keuangan negara dalam arti yang sempit (Soeria Atmadja, 1986).

Pengertian keuangan negara dalam arti luas yang dimaksud adalah keuangan yang berasal dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disingkat APBD), Keuangan Unit-unit Usaha Negara atau perusahaan-perusahaan milik negara dan pada hakikatnya seluruh kekayaan negara. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit adalah keuangan yang berasal dari APBN saja. Menurut Hasan Akmal, pengertian keuangan negara adalah merupakan pengertian keuangan dalam arti luas, dikaitkan dengan tanggung jawab pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disingkat BPK) (Soeria Atmadja, 1986).

Keuangan negara menurut definisi lain, yaitu Van der Kemp adalah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu (baik berupa uang maupun barang) yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak-hak tersebut (Winayanti, 2015). Sedangkan menurut Otto Ekstein, dalam public finance mengemukakan bahwa keuangan negara adalah bidang yang mempelajari akibat dari anggaran belanja atas ekonomi, khususnya akibat dari dicapainya tujuan ekonomi yang pokok pertumbuhan, keadilan, dan efisiensi (Ekstein, 1981).

Pengertian keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (selanjutnya di singkat UUKN) memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas dan dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas meliputi hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tidak tercakup dalam anggaran negara. Sementara itu, keuangan negara dalam arti sempit hanya terbatas pada hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk barang milik negara yang tercantum dalam anggaran negara untuk tahun yang bersangkutan (Saidi, 2014).

Pengertian keuangan negara sebagaimana tercantum pada penjelasan umum UUKN adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut di atas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
4. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran itu pada mulanya dipahami sebagai keuangan negara yang kemudian tercermin dalam perumusan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disusun pada tahun 1945. Karena itu, dapat dikatakan bahwa awalnya, yang dimaksud dengan uang atau keuangan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan adalah anggaran pendapatan dan belanja negara saja. Dalam pengertian sempit ini diasumsikan bahwa semua uang negara, masuk dan keluarnya, diperhitungkan seluruhnya

melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Tidak ada uang lain yang termasuk pengertian uang negara di luar anggaran pendapatan dan belanja negara. anggaran pendapatan dan belanja negara memiliki dua aspek, yaitu perhitungan pendapatan negara dan perhitungan belanja negara. Bentuk atau formatnya, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara itu dituangkan dalam bentuk Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2.1.6 Teori/Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya di sebut APBDes, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. APBDes terdiri atas:

A. Pendapatan Desa

Dana Desa merupakan sejumlah anggaran dana yang dialokasikan pada desa dari pemerintah, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang merupakan sumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Alokasi dana yang harus digunakan secara konsisten dan terkendali. Setiap kegiatan yang menggunakan alokasi dana harus melalui beberapa tahapan dan segala bentuk laporan yang dibuat harus transparan dan dapat di pertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa. Sumber pendapatan desa dikelola melalui APBDes. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pengelolaan keuangan desa

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

1. Pendapatan desa, terdiri atas kelompok:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
 - b. Transfer; dan
 - c. Pendapatan lain-lain.
2. Kelompok PADesa, terdiri atas jenis:
 - a. Hasil usaha;
 - b. Hasil aset;
 - c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
3. Hasil Usaha Desa, antara lain:
 - a. Hasil Bumdes;
 - b. Tanah kas desa.
4. Hasil aset, antara lain:
 - a. ambatan perahu;
 - b. Pasar desa;
 - c. Tempat pemandian umum;
 - d. Jaringan irigasi.

5. Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
6. Kelompok transfer, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa;
 - b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa (ADD);
 - d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.
7. Kelompok pendapatan lain-lain, terdiri atas jenis:
 - a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
 - b. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah.
8. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga. Serta lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain:
 - a. Hasil kerja sama dengan pihak ketiga;
 - b. Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

B. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.

1. Klasifikasi belanja desa, terdiri atas kelompok:
 - a. Penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Pelaksanaan pembangunan desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan desa;
 - d. Pemberdayaan masyarakat desa;
 - e. Belanja tak terduga.
2. Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan ini terdiri atas jenis belanja:
 - a. Pegawai;
 - b. Barang dan jasa;
 - c. Modal
3. Jenis belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat desa. Belanja pegawai dianggarkan dalam:
 - a. Kelompok penyelenggaraan pemerintah desa;
 - b. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan;
 - c. Belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
4. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Belanja barang/jasa antara lain:
 - a. Alat tulis kantor;
 - b. Benda pos;

- c. Bahan/material;
- d. Pemeliharaan;
- e. Cetak/penggandaan;
- f. Sewa kantor desa;
- g. Sewa perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. Makanan dan minuman rapat;
- i. Pakaian dinas dan atributnya;
- j. Perjalanan dinas;
- k. Upah kerja;
- l. Honorarium narasumber/ahli;
- m. Operasional pemerintah desa;
- n. Operasional badan permusyawaratan desa;
- o. Insentif RT/RW;
- p. Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

C. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

1. Pembiayaan desa, terdiri atas kelompok:
 - a. Penerimaan pembiayaan;
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
2. Penerimaan pembiayaan, mencakup:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
3. Pengeluaran pembiayaan, terdiri dari:
- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal desa.

Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 29 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri atas lima tahapan utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Setiap tahapan memiliki fungsi strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berlangsung secara tertib, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, tahapan-tahapan yang dirumuskan tersebut dijadikan indikator penelitian karena secara langsung menggambarkan unsur-unsur yang harus ada dalam praktik pengelolaan keuangan desa. Kelima tahapan ini membentuk satu siklus manajemen keuangan desa yang bersifat menyeluruh dan terintegrasi. Sebagai regulasi yang mengatur tata kelola keuangan desa secara nasional, pasal ini menjadi dasar teoritis penting dalam memahami bagaimana APBDes. seharusnya dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

1. Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan pondasi bagi seluruh proses pengelolaan keuangan desa. Dalam teori manajemen publik, perencanaan berfungsi menetapkan arah pengelolaan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Di tingkat operasional,

perencanaan keuangan desa diwujudkan melalui penyusunan RKPDes. Dokumen ini menjadi acuan utama dalam menentukan prioritas program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Tahap ini menekankan prinsip partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan melalui musyawarah desa untuk menentukan kebutuhan dan arah kebijakan desa.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menggambarkan proses operasional dari penggunaan anggaran yang telah direncanakan. Menurut teori pengelolaan keuangan publik, pelaksanaan anggaran harus mengikuti prinsip efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pada regulasi. Pada tahap ini, pemerintah desa menjalankan kegiatan pembangunan dan administrasi sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Seluruh pengeluaran harus dilengkapi bukti yang sah, serta dijalankan oleh pelaksana kegiatan yang berwenang. Tahap ini memastikan bahwa dana desa digunakan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan tahap administratif yang menekankan pentingnya pencatatan transaksi keuangan secara sistematis. Dalam pendekatan akuntansi sektor publik, penatausahaan merupakan bentuk kontrol internal untuk menjamin keteraturan dan ketertiban pengelolaan keuangan. Di desa, penatausahaan dilaksanakan oleh Kaur

Keuangan yang wajib mencatat setiap transaksi keuangan dalam Buku Kas Umum, Buku Bank, dan Buku Pajak. Tahap ini juga menjadi dasar penyusunan laporan keuangan sehingga ketepatan dan keakuratan pencatatan sangat memengaruhi kualitas pelaporan.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan wujud akuntabilitas pemerintah desa kepada pemerintah daerah dan masyarakat desa. Teori akuntabilitas publik menyebutkan bahwa pelaporan diperlukan untuk memastikan adanya transparansi dan keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran desa. Dalam regulasi, laporan realisasi APBDes disampaikan secara berkala, biasanya per semester, kepada bupati atau wali kota melalui camat. Pelaporan ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme administratif, tetapi juga merupakan sarana partisipasi publik karena hasilnya harus diinformasikan secara terbuka kepada masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban adalah bagian akhir dari siklus pengelolaan keuangan desa. Dalam teori *governance*, pertanggungjawaban merupakan aspek penting untuk menjamin bahwa penyelenggara pemerintahan bertindak sesuai prinsip *good governance*. Pada tahap ini, kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes kepada pemerintah daerah. Selain itu, pemerintah desa juga memiliki kewajiban menyampaikan

informasi pertanggungjawaban kepada masyarakat agar tercipta transparansi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa.

APBDes adalah instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik antara lain dapat diukur melalui proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDes. Sebagai pemegang otonomi asli, desa lebih leluasa dalam menentukan arah kebijakan pembangunan desa dengan dibingkai APBDes. Fungsi kontrol sangat penting untuk melihat sejauh mana transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa.

APBDes pada prinsipnya merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran desa selama satu tahun kedepan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama BPD yang dituangkan kedalam peraturan desa sesuai dengan pedoman yang di sahkan oleh Bupati. Dengan adanya APBDes, penyelenggaraan pemerintahan desa akan memiliki sebuah rencana strategis yang terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan yang dipergunakan. Anggaran desa dipergunakan secara seimbang berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah agar tercipta cita-cita *good governance*. Oleh karena itu, APBDes mendorong pemerintah desa agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang tertuang didalamnya.

APBDes menunjukkan bagaimana pemerintahan desa akan mencapai tujuan spesifik dalam membangun dan mengatur desanya. APBDes mencakup semua program dan kegiatan pemerintahan desa, termasuk pembangunan fisik desa dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat untuk

berpartisipasi dalam proses penyusunan, perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan APBDes (Samosir, 2022).

APBDes dibuat oleh Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. APBDes ditetapkan setiap tahun (Desi, 2021).

APBDes merupakan suatu rencana keuangan tahunan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. (Sumpeno, 2015).

Pandangan perspektif hukum ekonomi terhadap APBDes. Mereka memandang APBDes sebagai kerangka kebijakan keuangan desa yang dibangun atas asas legalitas, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Definisi ini menekankan bahwa APBDes tunduk pada regulasi yang ketat dan merupakan instrumen publik yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum (Raehana & Lawang, 2025).

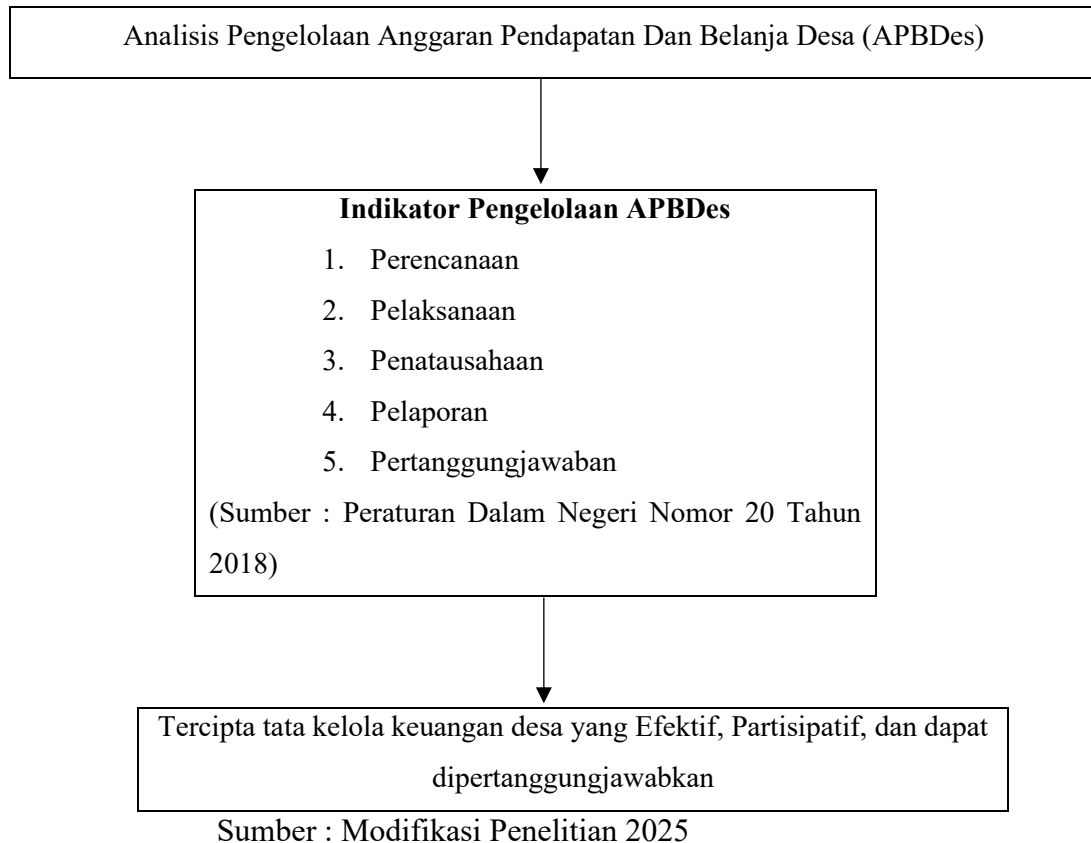
Dari sudut pandang evaluatif, APBDes sebagai alat pengendali pembangunan desa yang memungkinkan pemerintah desa membatasi pengeluaran berdasarkan skala prioritas dan menilai efektivitas program pembangunan. Dengan demikian, APBDes tidak hanya berperan sebagai dokumen perencanaan tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang membantu menilai apakah kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target yang diharapkan (Sari & Purnomo, 2020).

Berdasarkan berbagai pandangan ahli, APBDes dipahami sebagai instrumen utama dalam pengelolaan keuangan desa yang memiliki fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan desa. Para ahli sepakat bahwa APBDes merupakan dokumen keuangan tahunan yang disusun secara sistematis untuk menggambarkan bagaimana pemerintah desa merencanakan serta mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan pembangunan.

Secara keseluruhan, kesimpulan dari para ahli tersebut mengarah pada pemahaman bahwa APBDes adalah dokumen keuangan desa yang bersifat normatif, strategis, partisipatif, legal, dan evaluatif. APBDes berfungsi sebagai pedoman pengelolaan keuangan desa sekaligus menjadi alat untuk mengamati efektivitas pembangunan. Dengan struktur yang sistematis dan mekanisme penyusunan berbasis musyawarah, APBDes menjadi fondasi utama dalam memastikan bahwa pembangunan desa berjalan secara efisien, transparan, akuntabel, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran

Gambar II.1: Kerangka Pemikiran Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi



2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan awal atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Disebut sementara karena jawaban tersebut masih bersifat teoritis dan belum dibuktikan melalui data empiris di lapangan. Hipotesis disusun berdasarkan teori-teori yang relevan dan akan diuji kebenarannya melalui proses pengumpulan dan analisis data dalam penelitian. Berdasarkan landasan tersebut, peneliti merumuskan hipotesis bahwa **"Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan**

Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal."

2.4 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, maka berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini.

Adapun yang akan diteliti dalam penelitian ini mengenai Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, dengan indikator.

2.4.1 Perencanaan

Perencanaan adalah rangkaian proses pemikiran yang matang tentang apa yang akan dilakukan pada masa mendatang berdasarkan analisis sistematis terhadap kondisi organisasi. Definisi ini memberikan penekanan pada pentingnya analisis dalam menyusun rencana yang realistis dan terukur (Siagian, 2012b).

2.4.2 Pelaksanaan

Tjokroadmudjoyo mengemukakan bahwa pelaksanaan sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang dikehendaki melalui serangkaian proses yang telah direncanakan (Pinilas et al., 2017).

2.4.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan publik adalah proses administratif yang mencakup pencatatan semua transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran, menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban. Proses ini dilakukan secara sistematis agar seluruh data keuangan dapat ditelusuri dan diverifikasi (Mardiasmo, 2016b).

2.4.4 Pelaporan

Pelaporan keuangan adalah penyajian informasi keuangan yang sistematis dan lengkap mengenai seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran, sehingga pihak yang berkepentingan dapat menilai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Pelaporan yang tepat waktu dan akurat merupakan bagian penting dari good governance, karena memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data (Mardiasmo, 2016b).

2.4.5 Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan adalah kewajiban pengelola dana publik untuk menyusun laporan yang jelas, akurat, dan transparan mengenai penggunaan anggaran, serta menyampaikan laporan tersebut kepada pihak yang berhak melakukan pengawasan. Pertanggungjawaban tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mencerminkan integritas, profesionalisme, dan etika pengelola keuangan (Mardiasmo, 2016b).

2.5 Operasional Variabel

Tabel II.1 : Operasional Variabel Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

Konsep	Varibael	Indikator	Item	Ukuran
Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.	Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi	Perencanaan	1. RKPDes	Ordinal
			2. Musyawarah Desa	
			3. Penyelarasan dengan RPJMDes	
		Pelaksanaan	1. Realisasi Kegiatan sesuai DPA	Ordinal
			2. Penggunaan Anggaran	
			3. Kesesuaian fisik dan rencana	
		Penatausahaan	1. Pencatatan BKU	Ordinal
			2. Pencatatan Buku Pembantu	
			3. Kelengkapan Bukti transaksi	
		Pelaporan	1. Laporan realisasi semesteran	Ordinal
			2. Ketepatan waktu pelaporan	
			3. Penyampaian kepada camat/bupati	
		Pertanggungja waban	1. Penyusunan LPJ APBDes	Ordinal
			2. Musyawarah pertanggungja waban	
			3. Audit/Pemeriks aan	

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi, modifikasi, atau perlakuan terhadap variabel penelitian (Sugiyono, 2016). Penelitian Kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang individu atau kelompok yang terlibat dalam situasi tersebut (Syam et al., 2025).

3.2 Informan

Informan adalah individu yang dimanfaatkan peneliti untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi penelitian secara mendalam karena dianggap mengetahui dan memahami fenomena yang diteliti (Moleong, 2017).

Adapaun yang menjadi informan penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel III.1 : Informan Penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

No	Unsur Informan	Jumlah		Persentase
		Informan	Key Informan	
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Ketua BPD	1	1	100%
3	Sekretaris Desa	1	1	100%
4	Kaur Keuangan	1	1	100%
5	Tokoh Masyarakat	3	3	100%
Jumlah		7	7	100%

Sumber : Modifikasi Penelitian 2025

Teknik penarikan informan dapat dilakukan melalui *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Dalam *purposive sampling*, peneliti menetapkan kriteria khusus berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan dalam *snowball sampling*, informan awal memberikan rekomendasi terhadap informan lain yang relevan, sehingga jumlah informan dapat berkembang secara bertahap sesuai kebutuhan data (Sugiyono, 2016).

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggerakkan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari, seperti observasi yang bersifat langsung sehingga akurasi lebih tinggi, akan tetapi seringkali tidak efisien karena memperolehnya diperlukan sumber data yang lebih besar (Sugiyono, 2018).

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berbentuk dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia, sehingga mempunyai efisiensi yang tinggi akan tetapi kadang-kadang kurang akurat (Sugiyono, 2016).

3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, fokus penelitian adalah analisis pengelolaan APBDes di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

3.5 Lokasi Penelitian

Adapun Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat Jalan Perkebunan Desa Rawang Oguang Kode Pos 29561

3.6 Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi :

3.6.1 Observasi

Menurut Arikunto observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis (Gunawan & Imam, 2015).

3.6.2 Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil”. Wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan dengan telepon (Sugiyono, 2016).

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambar atau arkeologis (Gunawan & Imam, 2015).

3.6.4 Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam teknik triangulasi peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2014).

3.7 Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu model Miles dan Hubberman, aktivitas dalam analisis data, yaitu *Data Reduction*, *Data Display*, *Conclusion Drawing/Verification* (Sugiyono, 2016).

Berikut penjelasan mengenai tiga tahapan tersebut :

3.7.1 *Data Reduction* (Reduksi data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2016).

3.7.2 *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2016).

3.7.3 *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan merupakan proses merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan sehingga menghasilkan temuan baru yang mampu menjawab rumusan masalah penelitian. Dengan demikian, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan pemahaman mendalam terhadap konteks, interpretasi terhadap data empiris di lapangan, serta penguatan melalui proses triangulasi. Hasil akhir dari penarikan kesimpulan ini

menjadi gambaran utuh mengenai fenomena yang diteliti serta memberikan jawaban komprehensif terhadap fokus penelitian (Sugiyono, 2016).

3.8 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.2 : Jadwal Kegiatan Penelitian Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kegiatan	Bulan dan Minggu dalam Tahun 2024-2025																							
		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul Proposal		X																						
2	Pembuatan Proposal													X	X	X	X								
3	Bimbingan Proposal																	X	X	X					
4	Seminar Proposal																					X			
5	Revisi Proposal																						X		
6	Pembuatan Skripsi																							X	X
7	Bimbingan Skripsi																								X
8	Sidang Skripsi																								
9	Revisi Skripsi																								

Sumber : Modifikasi Penelitian Tahun 2025.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Desa Rawang Oguang

Dinamakan Rawang Oguang yaitu diambil dari sebuah kisah yaitu dimana di sebuah rawa tepat pada jembatan penghubung desa tersebut. Rawa tersebut di aliri sungai yang cukup dalam, dan dirawa tersebut ada sebuah pohon besar yang berumur cukup tua, konon katanya di pohon tersebut ada sebuah makhluk seperti gong besar yang hanya berbunyi sekali-kali dan bunyinya hampir menyerupai alat musik gong. Maka masyarakat menamai desa tersebut dengan nama Desa Rawang Oguang.

Desa Rawang Oguang adalah desa pemekaran yang awalnya Desa Sungai Sorik, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Awalnya desa ini adalah dusun III Desa Sungai Sorik, jumlah penduduk awalnya sebanyak 1454 jiwa dan KK nya 166 KK. Dengan adanya rencana pemekaran kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, Desa Sungai Sorik juga di mekarkan oleh pemerintah. Kemudian pada tanggal 10 Oktober 2012 Desa Sungai Sorik di mekarkan sehingga menjadi Desa baru namanya Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam pelaksanaan jalannya roda pemerintahan Pucuk adat dibantu oleh kepala-kepala suku atau di sebut juga dengan nama Ninik Mamak Nen Barompek.

Adapun persukuan dan gelar kepala suku yang ada di Desa Rawang Oguang Yaitu suku tigo kampung, suku limo kampung, suku malayu, dan suku cemin.

Sedangkan Kepala Desa yang pernah menjabat di Desa Rawang Oguang adalah sebagai berikut :

Periode Tahun 2013 s/d Tahun 2019 adalah Syapris

Periode Tahun 2019 s/d Sekarang adalah Dedi,S.Pd

Desa Rawang Oguang merupakan salah satu yang ada di kecamatan Kuantan Hilir Seberang dengan mayoritas penduduk asli desa yang mempunyai beberapa suku. Seperti, suku tigo kampuang, suku limo kampuang, suku cemin, dan suku melayu, dan setiap suku di kepalai oleh kepala suku yang di sebut sebagai ninik mamak, dimana ninik mamak sangat berperan di desa sebagai menyelesaikan permasalahan terutama permasalahan suku di desa.

4.2 Keadaan Geografis

Desa Rawang Oguang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Secara geografis, desa ini memiliki letak yang cukup strategis karena berada di wilayah dataran rendah dengan kondisi tanah yang relatif subur dan didominasi oleh area perkebunan serta lahan pertanian masyarakat.

4.2.1 Batas Wilayah

Letak geografi Desa Rawang Oguang, terletak diantara :

1. Sebelah utara : Desa Sungai Sorik
2. Sebelah Selatan : Desa Punt Kayu Pematang Peranap
3. Sebelah Barat : Desa Teratak Jering
4. Sebelah Timur : Desa Pulau Beralo dan Petai Inuman

4.2.2 Luas Wilayah

1. Pemukiman	: 10 Ha
2. Pertanian Sawah	: 25 Ha
3. Ladang/tegalan	: 2 Ha
4. Perkebunan	: 600 Ha
5. Hutan	: - Ha
6. Rawa-rawa	: 5 Ha
7. Perkantoran	: 0,25 Ha
8. Sekolah	: 0,25 Ha
9. Jalan	: 40 Ha
10. Lapangan Sepak Bola	: - Ha

4.2.3 Orbitasi

1. Jarak ke Ibu Kota Kecamatan terdekat	: 1 KM
2. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan	: 15 Menit
3. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	: 60 KM
4. Lama jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten	: $\pm$ 50 Menit

4.3 Keadaan Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang sebanyak 777 jiwa yang tersebar di tiga dusun. Dusun I memiliki 237 jiwa, Dusun II sebanyak 263 jiwa, dan Dusun III merupakan dusun dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 277 jiwa.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 387 jiwa dan perempuan sebanyak 390 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan sedikit lebih banyak dibandingkan laki-laki.

Pada masing-masing dusun, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang.

Sementara itu, berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas penduduk Desa Rawang Oguang berada pada tingkat pendidikan dasar. Penduduk yang tamat SD/ sederajat merupakan jumlah terbanyak yaitu 309 jiwa, diikuti oleh yang belum sekolah sebanyak 141 jiwa. Selanjutnya, penduduk dengan pendidikan SLTP berjumlah 149 jiwa dan SLTA sebanyak 134 jiwa. Untuk pendidikan tinggi, jumlahnya masih relatif sedikit, yaitu Diploma/S1 sebanyak 33 jiwa dan S2 hanya 2 jiwa. Untuk mengetahui Jumlah Penduduk dapat di lihat Pada tabel berikut :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Dusun	Jumlah (Jiwa)
1	Dusun I	237
2	Dusun II	263
3	Dusun III	277
Total Jumlah		777

Sumber : Data Olahan Tahun 2026

Sedangkan Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Jenis Kelamin

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah (Jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Dusun I	113	124	237
2	Dusun II	137	126	263
3	Dusun III	137	140	277
Total Jumlah		387	390	777

Sumber : Data Olahan Tahun 2026

Kemudian Sedangkan Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tingkat Pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel IV.3 : Jumlah Penduduk Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Belum Sekolah	141
2	Tamat SD/Sederajat	309
3	Tamat SLTP/Sederajat	149
4	Tamat SLTA/Sederajat	134
5	Diploma/S1	33
6	S2	2

Sumber : Data Olahan Tahun 2026

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi oleh pendidikan dasar, sehingga perlu adanya peningkatan akses dan kesadaran terhadap pendidikan yang lebih tinggi di masa mendatang.

4.4 Sarana Dan Prasarana Desa

Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas umum sudah cukup memadai dalam menunjang aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara keseluruhan, terdapat 10 unit sarana dan prasarana yang tersebar dalam beberapa bidang penting, yaitu pendidikan, keagamaan, olahraga, pemerintahan, dan kesehatan. . Untuk mengetahui Sarana dan Prasarana Desa dapat di lihat Pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah Sarana dan Prasarana Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Pendidikan	Jumlah (Unit)	Total (Unit)
1	Sarana Pendidikan - TK/PAUD	1 Unit	1 Unit
2	Tempat Ibadah - Masjid - Mushollah	1 Unit 3 Unit	4 Unit
3	Sarana Olahraga - Lapangan Voli	2 Unit	2 Unit
4	Kantor Desa	1 Unit	1 Unit
5	Balai Desa	1 Unit	1 Unit
6	Sarana Kesehatan - Poskesdes	1 Unit	1 Unit
Jumlah		10 Unit	10 Unit

Sumber : Data Olahan Tahun 2026

Pada bidang pendidikan, terdapat 1 unit TK/PAUD yang digunakan untuk pendidikan anak usia dini. Dalam bidang keagamaan, tersedia 4 unit tempat

ibadah yang terdiri dari 1 masjid dan 3 musholla, yang dimanfaatkan untuk kegiatan ibadah dan sosial masyarakat.

Untuk sarana olahraga, desa memiliki 2 unit lapangan voli yang diunakan masyarakat untuk aktivitas olahraga. Di bidang pemerintahan, terdapat 1 kantor desa sebagai pusat pelayanan administrasi dan 1 balai desa sebagai tempat musyawarah dan kegiatan masyarakat.

Sementara itu, pada bidang kesehatan terdapat 1 unit Poskesdes yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, sarana dan prasarana di Desa Rawang Oguang sudah cukup mendukung kebutuhan masyarakat, meskipun masih perlu ditingkatkan untuk menunjang pembangunan desa yang lebih baik.

4.5 Keadaan Ekonomi .

4.5.1 Pertanian

Tabel IV.5 : Jumlah Sektor Pertanian Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Padi Sawah	45 Ha
2	Padi Ladang	10 Ha
3	Palawija	1 Ha
4	Kakao/Coklat	1 Ha
5	Sawit	± 9.569 Ha
6	Karet	± 974 Ha
7	Kelapa	± 4 Ha

Sumber : RPJMDes Rawang Oguang Tahun 2026

Pada sektor pertanian, komoditas yang paling dominan adalah perkebunan kelapa sawit dengan luas ±9.569 Ha, diikuti oleh tanaman karet seluas ±974 Ha.

Selain itu, terdapat juga lahan padi sawah seluas 45 Ha dan padi ladang seluas 10 Ha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Komoditas lain seperti palawija, kakao, dan kelapa masih dalam skala kecil. Hal ini menunjukkan bahwa struktur pertanian di desa Rawang Oguang lebih berfokus pada sektor perkebunan dibandingkan tanaman pangan.

4.5.2 Peternakan

Tabel IV.6 : Jumlah Sektor Peternakan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)
1	Kambing	210 Ekor
2	Sapi	75 Ekor
3	Kerbau	95 Ekor
4	Ayam	762 Ekor
5	Itik	265 Ekor
6	Burung	43 Ekor
7	Lain-Lain	-

Sumber : RPJMDes Rawang Oguang Tahun 2026

Pada sektor peternakan, masyarakat juga cukup aktif dalam memelihara berbagai jenis ternak. Ternak ayam merupakan yang terbanyak dengan jumlah 762 ekor, diikuti oleh itik sebanyak 265 ekor dan kambing sebanyak 210 ekor. Selain itu, terdapat pula sapi sebanyak 75 ekor dan kerbau sebanyak 95 ekor. Keberadaan peternakan ini menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat, meskipun masih bersifat skala rumah tangga.

4.5.3 Perikanan

Tabel IV.7 : Jumlah Sektor Perikanan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis	Luas (Ha)
1	Tambak Ikan Darat	3 Ha
2	Tambak Udang	-
3	Keramba Apung	-
4	Lain-lain	-

Sumber : RPJMDes Rawang Oguang Tahun 2026

Sementara itu, pada sektor perikanan, pemanfaatan sumber daya masih tergolong terbatas. Hal ini terlihat dari hanya adanya tambak ikan darat seluas 3 Ha, sedangkan jenis usaha perikanan lain seperti tambak udang dan keramba apung belum tersedia. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan belum menjadi sektor unggulan di desa.

4.5.4 Stuktur Mata Pencaharian

Tabel IV.8 : Jumlah Mata Pencaharian Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)
1	Petani	378 Orang
2	Pedagang	27 Orang
3	PNS	6 Orang
4	Tukang	8 Orang
5	Guru	7 Orang
6	Bidan/Perawat	-
7	TNI/Polri	1 Orang
8	Pensiunan	3 Orang
9	Sopir/Angkutan	2 Orang
10	Buruh	4 Orang
11	Jasa Persewaan	-

12	Swasta	245 Orang
13	Peternak	89 Orang

Sumber : RPJMDes Rawang Oguang Tahun 2026

Dilihat dari struktur mata pencaharian, sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani dengan jumlah 378 orang. Selain itu, terdapat 245 orang yang bekerja di sektor swasta dan 89 orang sebagai peternak. Pekerjaan lainnya seperti pedagang, tukang, guru, buruh, serta profesi lainnya jumlahnya relatif sedikit. Hal ini memperkuat bahwa perekonomian desa masih sangat bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan.

4.6 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang menganut sistem kelembagaan pemerintah desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dengan gambar sebagai berikut :

Gambar IV.1 : Struktur Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber : Kantor Desa Rawang Oguang Tahun 2026

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa dan Perangkat Desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.

Kepala Desa memiliki tugas utama memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Secara sederhana, Kepala Desa bertanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, serta memberdayakan masyarakat desa. Selain itu, Kepala Desa juga mengelola keuangan dan aset desa serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Sementara itu, Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Sekretaris Desa berperan dalam mengelola administrasi dan pelayanan pemerintahan. Kepala Urusan membantu dalam bidang tertentu seperti keuangan dan tata usaha. Kepala Seksi menjalankan tugas operasional seperti bidang pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Kepala Dusun bertugas mengelola wilayah dusun dan menjadi penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang umumnya sudah sesuai dengan aturan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :

- 6.2.1 Pemerintah desa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan APBDes, khususnya dalam musyawarah desa, sehingga perencanaan yang dihasilkan lebih aspiratif, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 6.2.2 Pemerintah desa perlu meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan desa dengan menyampaikan informasi secara terbuka dan berkelanjutan kepada masyarakat, baik melalui media informasi maupun forum musyawarah desa.
- 6.2.3 Aparatur desa diharapkan dapat meningkatkan ketelitian, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam penatausahaan keuangan, terutama dalam pencatatan serta kelengkapan bukti transaksi, guna mewujudkan administrasi keuangan yang tertib dan akuntabel.
- 6.2.4 Perlu adanya peningkatan koordinasi dan kerja sama antar perangkat desa dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga penggunaan anggaran dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
- 6.2.5 Pemerintah desa diharapkan dapat melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait pengelolaan APBDes, sehingga masyarakat tidak hanya mengetahui hasil kegiatan, tetapi juga memahami proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.

6.2.6 Pemerintah desa diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan, baik dari segi ketepatan waktu, kelengkapan data, maupun kejelasan informasi, agar dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat dan pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu.
- Andri, A., & Siregar, M. H. (2021). *Keuangan Negara & Daerah*. Rajawali Pers.
- Basri, Y. Z., & Subri, M. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Desi, A. (2021). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Lebba'e Kecamatan Ajangale*.
- Dwipayana, A., & Eko, S. (2021). *Kepemimpinan Lokal dan Demokrasi Desa di Indonesia*. UGM Press.
- Dwiyanto, A. (2021). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Eko, S. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa Partisipatif*. Fisipol Press.
- Ekstein, O. (1981). *Keuangan Negara*. Bina Aksana.
- Griffin. (2004). *Manajemen Jilid 1*. Erlangga.
- Gunawan, & Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktif*. Jakarta Bumi Aksara.
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen*. BPFE.
- Handoko, T. H. (2022). *Manajemen dan Organisasi*. Alfabeta.
- Haris, S. (2022). *Desentralisasi dan Pemerintahan Lokal di Indonesia*. LP3ES.
- Hasibuan, M. S. P. (2020). *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara.
- Kencana, I. (2022). *Etika Administrasi Negara*. Bumi Aksara.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Organisasi*. Salemba Empat.
- Madrasah, K., Ciledug, I. A., Tangerang, K., & Mashud, I. (2021). *Manajemen kualitas Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna Ciledug Kota Tangerang Tahun 2021*. 17(1).
- Mardiasmo. (2016a). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset.
- Mardiasmo, D. (2016b). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah* (E. Revisi (ed.)). Penerbit Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, H. (2007). *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Gadjah Mada University Press.
- Ndraha, T. (2021). *Pemerintahan Desa dan Otonomi Asli*. Rineka Cipta.

- Nugroho, I. (2017). *Dinamika Kebijakan Publik: Analisis Kebijakan Publik dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H. (2020). *Teori Administrasi Publik*. Alfabeta.
- Pinilas, R., Gosal, R., & Kasenda, V. (2017). Partisipasi generasi muda dalam pelaksanaan pembangunan (studi kasus di Desa Damau Kecamatan Damau Kabupaten Talaud). *Jurnal Eksekutif*, 2(2).
- Raehana, S., & Lawang, H. (2025). Analisis pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 6(1), 12–24.
- Rahardjo, M. (2022). *Sosiologi Desa: Dinamika Sosial dan Kearifan Lokal*. UB Press.
- Rasyid, R. (2020). *Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Grasindo.
- Riyadi, S. (2023). *Sistem Sosial dan Pemerintahan Desa di Indonesia*. Alfabeta.
- Saidi, M. D. (2014). *Hukum Keuangan Negara*. Rajawali Pers.
- Samosir, M. S. (2022). Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2015–2019 (Studi Kasus pada Desa Langir Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(3), 178–183.
- Sari, D., & Purnomo, A. (2020). Fungsi anggaran desa dalam pengendalian pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik Indonesia*, 7(3), 210–222.
- Sedarmayanti. (2021). *Reformasi Birokrasi dan Good Governance*. Refika Aditama.
- Sedarmayanti. (2023a). *Manajemen Pemerintahan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal*. Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2023b). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju.
- Setiawan, A. A. (2025). Analisis Penerapan Teori Organisasi dalam Organisasi Modern: Studi Kasus pada BPJS Kesehatan. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 2(5), 363–369.
- Siagian, S. P. (2012a). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012b). *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2021). *Administrasi dan Birokrasi*. Bumi Aksara.
- Soeria Atmadja, A. P. (1986). *Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara*. PT. Gramedia.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT

Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Sulaiman, A. (2011). *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*. PT. Alumni.

Sumpeno, W. (2015). *Perencanaan Desa Terpadu*. Read.

Syafri, W. (2020). *Ilmu Pemerintahan: Teori dan Praktik di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Syam, E., Rizhan, A., & Desriadi. (2025). *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian: Untuk Peneliti Pemula*. CV Bintang Semesta Media.

Tangkilisan, H. (2020). *Ilmu Administrasi Negara*. Gava Media.

Terry, & George. (2005). *Dasar-Dasar Manajemen*. PT. Bumi Aksara.

Thoha, M. (2020). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Rajawali Pers.

Tjandra, W. R. (2006). *Hukum Keuangan Negara*. PT. Grasindo.

Wibowo, E. (2023). Transformasi Model Organisasi Pemerintahan Menuju Collaborative Governance. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik Indonesia*, 9(1), 45–59.

Winayanti, N. K. (2015). *Hand-out Pengertian Keuangan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara Penelitian

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : NOVENDRA
NPM : 220411061
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Islam Kuantan Singingi
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
Nama :
Jenis Kelamin :
Tingkat Pendidikan :
Usia :
Pekerjaan :
Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.

4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

D. Pertanyaan wawancara untuk unsur Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

1. Apakah penyusunan RKPDes Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan sesuai prosedur?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana pelaksanaan musyawarah desa dalam perencanaan APBDes Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

3. Apakah masyarakat telah dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

4. Apakah RKPDes yang disusun sudah selaras dengan RPJMDes di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

B. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

1. Apakah pelaksanaan kegiatan APBDes sudah sesuai dengan DPA di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana realisasi penggunaan anggaran di lapangan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

3. Apakah hasil pembangunan fisik sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

C. Penatausahaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

1. Apakah pencatatan keuangan dalam Buku Kas Umum (BKU) sudah dilakukan secara rutin di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

2. Bagaimana pencatatan dalam buku pembantu keuangan desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

3. Apakah seluruh transaksi sudah dilengkapi dengan bukti yang lengkap di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

D. Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

1. Apakah laporan realisasi APBDes sudah dibuat setiap semester di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah laporan disusun dan disampaikan tepat waktu di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

3. Kepada siapa laporan tersebut biasanya disampaikan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

E. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

1. Apakah penyusunan LPJ APBDes dilakukan setiap akhir tahun anggaran di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

2. Apakah dilaksanakan musyawarah desa dalam pertanggungjawaban APBDes di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

3. Apakah pernah dilakukan audit atau pemeriksaan terhadap APBDes di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN TENTANG

Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Kepada : Unsur Tokoh Masyarakat Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

A. Identitas Peneliti

Nama : NOVENDRA
 NPM : 220411061
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ilmu Sosial
 Universitas : Islam Kuantan Singingi
 Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)

B. Identitas Responden

No :
 Nama :
 Jenis Kelamin :
 Tingkat Pendidikan :
 Usia :
 Pekerjaan :
 Alamat :

C. Petunjuk Wawancara

1. Daftar pertanyaan wawancara ini hanya dimaksud untuk penulisan skripsi dan tidak merugikan siapapun.
2. Jawablah sesuai dengan yang Bapak/Ibu/Saudara/i ketahui, dan isilah titik-titik pada ruang yang telah disediakan.
3. Identitas Bapak/Ibu/Sadaura/i dijamin kerahasiannya.
4. Atas kerja sama Bapak/Ibu/Sadaura/i saya ucapkan terima kasih.

E. Pertanyaan wawancara untuk unsur Pemerintahan Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Perencanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

5. Bagaimana pelaksanaan musyawarah desa dalam perencanaan APBDes Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

6. Apakah masyarakat telah dilibatkan secara aktif dalam musyawarah desa di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

G. Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kegiatan APBDes sudah sesuai dengan DPA di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang realisasi penggunaan anggaran di lapangan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

6. Apakah hasil pembangunan fisik sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

H. Pelaporan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui laporan realisasi APBDes sudah dibuat setiap semester di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui laporan disusun dan disampaikan tepat waktu di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Kepada siapa laporan tersebut biasanya disampaikan di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

I. Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi .

4. Apakah Apakah Bapak/Ibu mengetahui penyusunan LPJ APBDes dilakukan setiap akhir tahun anggaran di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

5. Apakah dilaksanakan musyawarah desa dalam pertanggungjawaban APBDes di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

6. Apakah Apakah Bapak/Ibu mengetahui audit atau pemeriksaan terhadap APBDes di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi?

Berikan Ulasan

.....

2. Dokumentasi Penelitian



Gambar I : Wawancara dengan Kepala Desa Rawang Oguang



Gambar II : Wawancara dengan Ketua BPD Rawang Oguang



Gambar III :Wawancara dengan Sekretaris Desa Rawang Oguang



Gambar IV :Wawancara dengan Kaur Keuangan Desa Rawang Oguang



Gambar V :Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Rawang Oguang



Gambar VI :Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Perwakilan Pemuda)
Desa Rawang Oguang



Gambar VII :Wawancara dengan Tokoh Masyarakat (Perwakilan Perempuan)
Desa Rawang Oguang

3. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi Tentang Penunjukan Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail uniksquantan@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
NOMOR : 66 /Kpts/FIS/UNIKS/VIII/2025
TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI NEGARA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

- Menimbang :**
1. Bahwa penulisan skripsi merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Sarjana (S1) Administrasi Negara Universitas Islam Kuantan Singingi.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian skripsi, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama-nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2013 tentang Akreditasi Perguruan Tinggi.
 4. Peraturan Menteri Riset, teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi Nomor : 012/UNIKS/Kpts/III/2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural Dilingkungan Universitas Islam Kuantan Singingi.

- Memperhatikan :** Berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Tugas Akhir (TA) Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menunjuk :

- a. Pembimbing I : Sarjan M, S.Sos., M.Si
NIDN : 1008128002
- b. Pembimbing II : Alsar Andri, S.Sos., M.Si
NIDN : 1005108901

Untuk Penulisan Skripsi Mahasiswa :

Nama : Novendra
 NPM : 220411061
 Judul Skripsi : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Tugas-tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Sarjana (S1) Administrasi Negara dalam penulisan skripsi.
3. Dalam Pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan skripsi sesuai dengan Buku Panduan Program Sarjana (S1) Administrasi Negara.
4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

KUTIPAN : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
 PADA TANGGAL : 11 Agustus 2025
 Dekan,

Rika Ramadhanti
RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si
 NIDN. 1030058402

Tembusan :

1. Ketua Program Studi Administrasi Negara
2. Mahasiswa
3. Arsip

4. Surat Balasan Riset Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG
KEPALA DESA RAWANG OGUANG**

Jl. Perkebunan No....Desa Rawang Oguang, Kode Pos 29561

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 02/SKIP/RO/V/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : NOVENDRA
NPM : 220411061
Jurusan/Progam Studi : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ilmu Sosial
Universitas : Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)

Nama tersebut benar telah melakukan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang berlokasi di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul penelitian "**Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi**".

Demikian surat keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Rawang Oguang

Pada Tanggal : 08 Mei 2026

Kepala Desa Rawang Oguang

DEDI, S. Pd

5. Catatan Bimbingan Proposal



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
Jl. Gatot Subroto KM.7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
0760-561655, e-mail: Unisksuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

NAMA : NOVENDRA
NPM : 220411061
DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing
1. SARJAN M, S.Sos., M.Si
2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA RAWANG
OGUANG, KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG,
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan :

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
1.	6/11/2025	Cover diperbaiki Kata pengantar diperbaiki		Ans	21
		Daftar Isi diperbaiki Daftar Tabel, Daftar Gambar		Ans	21
		Latar Belakang Kutipan di akhir kalimat		Ans	21
		Manfaat Penelitian Tambahkan teori keuangan		Ans	21
2.	7/11/2025	Indikator Penelitian Perbaiki jenis penelitian		Ans	21

6. Catatan Bimbingan Skripsi



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax.
 0760-561655, e-mail Unikskuantan@gmail.com

CATATAN BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : NOVENDRA
 NPM : 220411061
 DOSEN PEMBIMBING : Pembimbing
 1. SARJAN M, S.Sos., M.Si
 2. ALSAR ANDRI, S.Sos., M.Si
 JUDUL : ANALISIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DESA (APBDes) DI DESA RAWANG
 OGUANG, KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG,
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Mulai Bimbingan :

NO	Hari/Tanggal	Catatan	Paraf		Paraf Mahasiswa
			P1	P2	
	27/2026 /A	Perbaiki Sesuai dengan Indikator penelitian		<i>Asy</i>	<i>y</i>
		Daftar Wawancara bagi 2 unsur pemerintah & Tokoh Masyarakat.		<i>Asy</i>	<i>y</i>
	28/2026. /A	Perbaiki Sesuai kebutuhan penelitian.		<i>Asy</i>	<i>y</i>
	4/2026. /S	Perbaiki Penulisan hasil wawancara.		<i>Asy</i>	<i>y</i>
		Perbaiki Hasil Indikator dan Sub Indikator		<i>Asy</i>	<i>y</i>

7. Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Proposal Penelitian



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jln Gatot Subroto KM. 07 Kebun Nenas jake Telp. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

Form 12

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI PROPOSAL

Proposal Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Novendra
 NPM : 220411061
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi

Hari/Tgl Ujian : Senin / 01 Desember 2025

Dinyatakan sudah melakukan revisi atas proposal skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Rika Ramadhanti, S.IP., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Sahri Muharam, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Pembimbing 1/ Anggota 1	3.
4.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Pembimbing 2/ Anggota 2	4.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

8. Lembar Persetujuan Pembimbing Untuk Revisi Skripsi Penelitian



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI

Form 11

UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL

Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan Telp. 0760-561655 Fax. 0760-561655, e-mail unikskuantan@gmail.com

PERSETUJUAN PEMBIMBING UNTUK REVISI SKRIPSI

Skripsi Mahasiswa dengan :

Nama : Novendra
 NPM : 220411061
 Program Studi : Administrasi Negara
 Judul : Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Rawang Oguang Kec. Kuantan Hilir Senerang Kab. Kuantan Tingingi

Hari/Tgl Ujian : Kamis/ 02 Juli 2026

Dinyatakan sudah melakukan Revisi atas Skripsinya.

NO	NAMA DEWAN SIDANG	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Emilia Emharis, S.Sos., M.Si	Ketua Dewan Sidang	1.
2.	Alsar Andri, S.Sos., M.Si	Sekretaris Dewan Sidang	2.
3.	Sarjan M, S.Sos., M.Si	Anggota 1	3.
4.	Dr. Desriadi, S.Sos., M.Si	Anggota 2	4.
5.	Risvandi, S.Pd.I., M.Si	Anggota 3	5.

Catatan:

Setelah ditandatangani, formulir ini diphotocopy oleh mahasiswa sebanyak pembimbing dan penguji yang hadir saat sidang skripsi dan diberikan kepada pembimbing 1 (satu) bersama dengan persyaratan lainnya.

9. Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : NOVENDRA
 Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Sorik, 29 Mei 1999
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Status : Belum Menikah
 Kebangsaan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun II RT 003 RW 002 Desa Rawang Oguang
 Kec. Kuantan Hilir Seberang
 Alamat Email : noventekaje2@gmail.com
 Pendidikan : 1. Tahun 2011 LULUS SD Negeri 013 Sungai Sorik
 2. Tahun 2014 LULUS SMP Negeri 3 Kuantan Hilir
 3. Tahun 2017 LULUS SMK Negeri 2 Teluk Kuantan

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Teluk Kuantan, 6 Mei 2026

Penulis

NOVENDRA
NPM.220411061